

PERGOLAKAN DI POLANDIA DAN PERTARUHAN UNI SOVIET

Bantarto BANDORO

I

Krisis dalam negeri Polandia yang diawali dengan pemogokan kaum buruh di Gdansk bulan Agustus tahun 1980 adalah suatu perkembangan penting di Eropa Timur selama 25 tahun terakhir dan mengisi kembali lembaran sejarahnya yang sebelumnya telah mencatat beberapa kejadian penting, antara lain peristiwa Berlin tahun 1953, Hongaria tahun 1956, Cekoslovakia tahun 1968 dan Polandia tahun 1956, 1970, 1976 dan 1980. Krisis di Polandia sekarang ini lebih berbahaya dari pada kejadian-kejadian sebelumnya karena bisa mengancam sistem dan dasar-dasar ideologi serta kekuasaan Uni Soviet. Bagi Uni Soviet Polandia sangat penting terutama karena posisinya sebagai negara penyanggah (buffer state) terhadap negara-negara tetangga Baratnya. Kemungkinan terjadinya perubahan mendasar di Polandia selain mempengaruhi strategi militer Uni Soviet dan membuka posisinya terhadap kemungkinan serangan dari luar juga mempengaruhi peranan ofensif cepat angkatan bersenjata Polandia dan kemampuannya dalam memimpin perang di Eropa. Oleh sebab itu Uni Soviet melihat perkembangan di Polandia sekarang ini bukan saja sebagai suatu krisis atau ancaman terhadap sistem komunisme tetapi juga sebagai sesuatu yang bisa menjadi sumber ketegangan di Eropa Timur. Uni Soviet kemungkinan akan mengambil tindakan jika krisis itu mencapai tingkat yang membahayakan Pakta Warsawa dan imperium Soviet sendiri. Perkiraan ini terutama didasarkan pada kepemimpinan komunis Polandia yang diragukan kemampuannya untuk mengatasi krisis itu dan sumbernya, yaitu gerakan buruh bebas, secara cepat.

Krisis Polandia sekarang ini merupakan suatu titik balik yang gawat dalam sejarah komunisme dan imperium Soviet. Perkembangan itu lebih penting bagi gerakan komunis dunia dan imperium Soviet di masa depan dari

pada revolusi yang terjadi di Hongaria tahun 1965 dan pergolakan buruh di Polandia tahun yang sama serta pembaharuan di Cekoslovakia tahun 1968. Kelangsungan hidup komunisme di Eropa Timur dan dunia dalam taruhan. Tulisan ini membahas pergolakan di Polandia itu, implikasi-implikasinya bagi Uni Soviet dan Eropa Timur dan sejauh mana Uni Soviet menganggapnya serius.

II

Krisis Polandia sekarang ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemimpin Polandia sebelumnya. Pemogokan yang menimbulkan kerusuhan dan menyebabkan jatuhnya Gierk pada bulan September 1980 merupakan kulminasi dari suatu proses fermentasi yang berakar dalam kebijakan ekonomi dan politik selama era kepemimpinannya. Gierk mencapai kekuasaan karena gelombang sentimen rakyat yang mendesak pembaharuan secara cepat. Dalam menghadapi gerakan buruh itu ia menempuh suatu cara yang menitikberatkan penghargaan yang lebih besar untuk warga negara dan dialog baik dengan gereja Katolik maupun massa. Selain itu, dalam melaksanakan pembangunan ekonomi Gierk menerapkan "strategi pembangunan baru" yang khusus dirancang untuk memperbaiki taraf hidup rakyat dan meningkatkan produktivitas pertanian maupun pertambangan.¹ Strategi pembangunan ini mengandalkan impor teknologi Barat yang dibiayai dengan kredit Barat dengan asumsi bahwa infusi masif teknologi Barat itu akan mampu mengubah ekonomi Polandia yang ekstensif menjadi intensif. Strategi ini berhasil selama periode 1971—1975 karena mampu memperbaiki taraf hidup rakyat. Misalnya, hasil bersih di bidang industri meningkat hampir 11% setiap tahunnya. Demikianpun kenaikan upah nyata sektor industri yang pada tahun 1961—1971 sebesar 1,8% per tahun pada tahun 1971—1975 meningkat menjadi 7,2% tiap tahunnya. Semuanya itu semakin memperkuat kedudukan Gierk.

Tetapi pada pertengahan dasawarsa 1970-an strategi Gierk itu mulai goyah. Laju pertumbuhan ekonomi menurun dan mengurangi kemampuan Polandia untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kreditnya. Keadaan ini timbul akibat beberapa faktor. Pertama, krisis energi menyebabkan meningkatnya harga minyak yang diperlukan untuk pembangunan. Kedua, resesi di Barat menghambat arus ekspor Polandia dan ini melenyapkan harapan Gierk bahwa perluasan kegiatan ekspor akan membantu memikul beban hutang luar negeri. Ketiga, kebijakan investasi pemerintah Gierk tidak realistis dan 40%

¹Lihat Jan B. de Weydenthal, "Poland: Communism Adrift," *The Washington Papers*, Volume VII, No. 72, 1979, hal. 23-25.

pendapatan nasional Polandia digunakan untuk impor industri berat. Sebaliknya tuntutan-tuntutan domestik yang semakin meningkat diabaikan. Keempat, pemerintah Gierek tidak mengambil langkah-langkah pembaharuan dalam sistem perencanaan dan pengelolaan.¹ Dengan demikian, kebijakan Gierek yang menekankan impor teknologi Barat gagal menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berarti di bidang produksi. Ini pada gilirannya menimbulkan salah urus (mismanagement) struktural di bidang ekonomi. Hal ini semakin terlihat pada tahun 1979-1980 dan pada waktu itu pula terungkap bahwa Gierek tidak mampu mengatasi masalah-masalah ekonomi. Pemerintah juga tidak memberitahukan keadaan ekonomi Polandia sesungguhnya kepada rakyatnya. Akibatnya terjadi luapan perasaan tidak puas rakyat dan buruh yang selama itu terpendam dan diajukan tuntutan-tuntutan. Mereka melancarkan pemogokan dan protes-protes di Gdanks pada bulan Agustus tahun 1980.

Dengan demikian, Polandia memperlihatkan lagi kepada dunia bahwa golongan komunis yang berkuasa tidak mampu menanggulangi masalah yang menyangkut persoalan dasar hidup manusia (khususnya di Eropa Timur), yaitu kebebasan dan pangan. Kejadian itu juga merupakan suatu petunjuk bahwa komunisme dunia menghadapi suatu krisis berat (throes of crisis).² Sistem komunisme yang diterapkan Gierek ternyata tidak mampu menjamin kehidupan yang layak bagi rakyat Polandia. Masalahnya adalah jelas, yaitu pemogokan buruh yang tiada tandingannya dalam sejarah negara itu. Mereka melakukan aksi mogok dan menyampaikan daftar tuntutan mulai dari yang sifatnya ekonomis sampai yang bersifat politis.³

Gelombang pemogokan buruh itu adalah sebagai akibat ketidakpuasan dengan keadaan ekonomi Polandia secara keseluruhan maupun tindakan pemerintah Polandia di bawah Gierek untuk menaikkan harga beberapa bahan pangan. Dari kejadian tahun 1980 itu terlihat bahwa di Polandia terjadi suatu polarisasi kekuatan, yaitu antara penguasa dan rakyat. Dalam menangani masalah pemogokan itu, Gierek menempuh cara yang berlainan dengan cara yang dilakukan pendahulunya Gomulka (1970). Gomulka mengerahkan kekuatan untuk menumpas pemogokan,⁴ sedangkan Gierek lebih senang berunding dengan kaum buruh seperti biasa dilakukan di negara-negara non komunis. Ini menunjukkan bahwa Gierek lebih menghendaki penyelesaian secara damai. Di lain pihak ia harus tetap mempertahankan

¹Lihat Seweryn Bialer, "Poland and the Soviet Imperium," *Foreign Affairs*, Vol. 59, No. 3, 1981, hal. 525.

²Lihat "Twilight of Communism," *US News & World Report*, 22 Desember 1980.

³Lihat O.N. Mehrota, "Crisis in Poland: Shock-waves in the Socialist Bloc," *Strategic Digest*, Vol. IV/7, Oktober 1980, hal. 328. Mengenai daftar tuntutan lihat Lampiran.

⁴Lihat Jan B. de Weydental, *op. cit.*, hal. 14-17.

hubungan baiknya dengan Uni Soviet. Hal itu menempatkan pemerintah Gierek dalam posisi yang sulit. Dalam keadaan itu ia memenuhi sebagian tuntutan buruh, antara lain pembentukan serikat buruh bebas Solidaritas, karena tidak ada pilihan lain.¹ Tetapi akibat langkah yang luwes ini Gierek digeser dari kedudukannya sebagai ketua partai komunis Polandia. Gierek memang tidak mungkin terus memegang pimpinan sebab pemogokan berlangsung terus, biarpun sebagian tuntutan buruh telah dipenuhi. Komite Pusat Partai Komunis Polandia kemudian mengangkat Stanislaw Kania, bekas kepala staf angkatan bersenjata Polandia, sebagai ketua partai. Pergantian itu tidak mengubah situasi. Gelombang pemogokan bahkan semakin meningkat di kota-kota besar lain di Polandia. Demikianpun tuntutan akan persetujuan-persetujuan terpisah dengan pemerintah semakin banyak. Selain itu, pemogokan di kota Szczecin berhasil memaksa penguasa menyiarkan misa hari minggu di radio secara regular, dan ini merupakan konsesi terbesar pemerintah yang sebelumnya selalu gagal diperjuangkan oleh gereja Katolik.²

Dengan demikian rezim komunis di Polandia gagal menekan buruh dan ini menunjukkan bahwa pada waktu itu ia tidak mempunyai gambaran jelas mengenai kekuatan buruh. Usaha-usaha buruh untuk menghimpun kekuatan bukan saja dilakukan dengan melakukan aksi mogok dan protes serta mengajukan tuntutan dasar lainnya, tetapi juga dengan mengadakan kongres Solidaritas pada tanggal 3 Oktober 1981. Selain untuk memperingati lahirnya organisasi pada bulan Agustus tahun 1980, kongres itu juga dimaksudkan untuk mengatasi kemelut politik dan krisis ekonomi Polandia yang semakin parah akibat ketidakmampuan pemerintah Polandia untuk mengatasinya secara cepat dan tepat. Sejak itu berkembang suatu kesadaran di kalangan Solidaritas bahwa tanggung jawab dan masa depan bangsa dan negara juga terletak di tangan Solidaritas. Kemenangan yang sejauh itu dicapai oleh buruh antara lain ialah: (1) pembentukan serikat buruh Solidaritas; (2) hak mogok dan menggukannya; (3) janji pemerintah untuk memberikan informasi mengenai keadaan ekonomi Polandia; (4) dihapuskannya hak monopoli partai atas media massa; (5) penyiaran misa hari Minggu secara regular; (6) janji pemerintah untuk memperhatikan masa depan petani swasta; (7) janji pemerintah untuk melakukan pembaharuan ekonomi; dan (8) lima hari kerja dalam satu minggu.³ Walaupun hasil yang dicapai buruh itu belum menggambarkan kemenangan buruh secara menyeluruh, kemenangan itu mencerminkan konsesi yang berarti dan mungkin akan berlangsung terus (endure).

Keberhasilan perjuangan Solidaritas ini terutama didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, gerakan masif kaum buruh sekarang ini secara

¹ Lihat O.N. Mehrota, *loc. cit.*, hal. 326.

² *Ibid*, hal. 328-329.

³ Lihat *The Economist*, 11 Juli 1981.

kualitatif berbeda dengan gerakan-gerakan lain yang pernah dilancarkan oleh kaum intelektual. Selain itu, gerakan buruh Solidaritas itu didukung oleh Komite Bela Diri Sosial (KOR).¹ Kedua, kejadian-kejadian di Polandia sebelumnya (tahun 1956, 1970, 1976) di mana buruh tidak mampu menghadapi perlawanan pemerintah oleh buruh dijadikan suatu pelajaran sehingga dalam tahun 1980 itu mereka berhasil mengembangkan suatu taktik baru yang lebih efektif. Dengan melakukan aksi duduk dan mogok kerja serta menguasai pabrik-pabrik mereka mengikutsertakan buruh-buruh lainnya untuk menekan pemerintah. Selain itu, buruh menunjukkan tingkat disiplin diri yang tinggi dan kemampuan untuk bertindak secara serentak (in concert). Ketiga, untuk pertama kalinya dalam sejarah Polandia kaum oposisi bergabung secara efektif, yaitu kaum buruh Solidaritas dan kaum intelektual disiden. Kerja sama mereka ini tercermin dalam dibentuknya komisi ahli yang berfungsi sebagai penasihat dan saluran komunikasi sehingga berita-berita mengenai gerakan buruh itu tersebar luas ke seluruh negeri. Selain itu, kemampuan Solidaritas untuk berkomunikasi dengan buruh-buruh lain di Polandia dan di luar Polandia memaksa pemerintah untuk memperhatikan tuntutan buruh. Gereja Katolik juga memainkan peranan penting dalam perjuangan buruh itu terutama dengan memberikan dukungan moral. Dukungan ini terutama dimaksudkan untuk memperlunak tuntutan-tuntutan politik buruh. Dengan demikian organisasi buruh Solidaritas itu mengakhiri sistem monopoli partai komunis Polandia. Lagi pula organisasi serupa itu memberikan suatu kekuatan veto yang efektif atas kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah kepada kaum buruh.

III

Perkembangan di Polandia itu terus menjadi pusat perhatian dunia khususnya Uni Soviet. Apa yang terjadi itu bisa merupakan titik balik komunisme di Eropa Timur dan mungkin juga di dunia komunis secara keseluruhan.² Sementara pihak berpendapat bahwa komunis Uni Soviet akan berhenti sebagai ideologi besar jika krisis Polandia itu tidak diselesaikan secara cepat.

Pemerintah Polandia telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan krisis itu. Antara lain ia mengadakan perundingan-

¹ Mengenai hubungan erat buruh dengan Komite Bela Diri Sosial (KOR) lihat lebih lanjut Jan B. de Weydental, "Worker and Party in Poland," *Problems of Communism*, Nopember-Desember 1980. Lihat juga O.N. Mehrota, *loc. cit.*, hal. 327.

² Lihat "Twilight of Communism," *loc. cit.* Lihat juga "Poland: Turning Point for Communism," *US News & World Report*, 27 Juli 1981.

perundingan secara bertahap dengan Solidaritas, mengeluarkan hukum perburuhan baru dan mengadakan kongres partai komunis Polandia (14 Juli 1981). Dalam kongres itu partai komunis Polandia menerima suatu program pembaharuan yang antara lain meliputi (1) pembentukan suatu komite untuk menyelidiki tindakan-tindakan penyelewengan tokoh-tokoh partai; (2) pembatasan fungsi partai dan pemisahan fungsi negara dari fungsi partai; dan (3) pembatasan masa jabatan pejabat-pejabat partai sampai dua kali. Program pembaharuan yang dalam istilah Polandia dikenal dengan sebutan "odnowa" ini telah diusulkan oleh Kania pada musim gugur tahun 1980 untuk mengkaji perubahan-perubahan mendalam akibat gerakan-gerakan buruh. Kebijaksanaan itu juga dituntut oleh pengurus cabang partai.

Usul-usul pembaharuan dan kongres partai komunis itu sendiri merupakan bagian dari usaha pemerintah Polandia untuk mengatasi krisis itu dan untuk mencegah intervensi Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Program pembaharuan itu telah memancing reaksi tajam partai komunis Uni Soviet dan beberapa negara tetangganya, antara lain Cekoslovakia dan Jerman Timur. Uni Soviet berpendapat bahwa pembangunan demokrasi partai di Polandia bisa menjadi preseden bagi negara-negara blok Soviet lainnya dan bahwa kemungkinan lahirnya sosialisme Polandia baru itu tidak sesuai dengan "role model"-nya yang biasa dianut oleh negara-negara Eropa Timur. Tetapi program pembaharuan itu ternyata tidak berhasil menyelesaikan krisis. Situasi di Polandia sejak itu bahkan semakin tidak menentu. Gerakan buruh bukanlah berkurang tetapi semakin meningkat dan membahayakan, terutama karena mengancam sistem ekonomi, monopoli kekuasaan dan ideologi partai komunis Polandia.

Krisis ekonomi Polandia sekarang ini tidak terlepas dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan dapat digambarkan sebagai berikut. Kenaikan pendapatan nasional Polandia pada awal dasawarsa 1970-an cukup tinggi, yaitu sebesar 9,4% per tahun. Tetapi pada pertengahan dasawarsa itu pertumbuhan ekonomi menurun dan sebagai akibatnya terjadi kontraksi ekonomi pada tahun 1979 dan 1980 di mana kenaikan pendapatan nasional masing-masing turun menjadi 2,2% dan 4%. Sementara itu, pengamat ekonomi Timur memperkirakan bahwa pendapatan nasional Polandia pada tahun 1981-1982 akan menurun 15%.¹ Faktor utama menurunnya pertumbuhan ekonomi Polandia itu adalah salah urus dalam modernisasi industri yang terlampau menekankan impor industri berat. Sebagai akibat salah urus ini Polandia harus menanggung beban hutang luar negeri yang berat. Pengamat ekonomi Eropa Timur berpendapat bahwa 2/3 dari hutang-hutang 1971-1980 adalah untuk barang-barang impor (teknologi).

¹Lihat George Blazycza, "Comecon and the Polish Crisis," *The World Today*, Oktober 1981, hal. 376.

Hutang-hutang luar negeri Polandia yang semakin meningkat dan yang diperkirakan berjumlah 27 milyar dollar itu menunjukkan semakin parahnya keadaan ekonomi Polandia terutama pada akhir bulan Desember 1981. Pejabat-pejabat Polandia sendiri memperkirakan bahwa hutang-hutang itu akan meningkat menjadi 33 milyar dollar pada tahun 1985.¹ Dalam menghadapi masalah ini Bank Sentral Polandia harus melakukan perundingan guna menyelesaikan hutang-hutang yang seharusnya dibayar pada tahun 1981 dan mengambil langkah-langkah untuk menjadwalkan kembali pembayaran hutang 11 milyar dollar yang harus dibayar pada tahun 1982 ini. Pemerintah Polandia juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah itu seperti terungkap dalam kunjungan ketua komisi perencanaan ekonomi ke Washington pada akhir bulan Desember 1981. Kunjungan itu dimaksudkan untuk memperbaharui kredit pangan sebesar 600 juta dollar untuk tahun 1982 maupun untuk menawarkan kepada Amerika Serikat suatu proyek yang macet akibat kekurangan dana. Amerika Serikat bersedia membantu tetapi di lain pihak juga ingin melihat kemajuan ekonomi Polandia, biarpun secara bertahap. Selain itu, pemerintah Polandia mengajukan permintaan untuk bergabung kembali dengan Dana Keuangan Internasional (IMF). Pada tahun 1950 atas tekanan Moskow, Polandia keluar dari IMF. Berkat keanggotaannya dalam IMF kemungkinan Polandia mendapat kredit dari badan itu dan Bank Dunia akan lebih besar dan badan ini dapat membantu pelaksanaan pembaharuan ekonomi Polandia secara besar-besaran. Hal itu kiranya juga akan memperkuat posisi tawar-menawarnya dengan bank-bank komersial Barat. Selain itu, bankir Polandia kiranya akan dapat memanfaatkannya sebagai kekuatan politik domestik untuk mendesak pemerintah agar merumuskan program-program pembaharuan fiskal.²

Menurut para pengamat ekonomi Timur Polandia adalah pusat utama kegiatan industri Eropa Timur. Tetapi sebagai akibat gelombang pemogokan buruh yang mulai di Gdansk tahun 1980, kegiatan industrinya, khususnya di sektor batu bara, menurun dan diperkirakan akan semakin menurun pada tahun-tahun mendatang. Hal itu bukan saja mempengaruhi segi-segi kehidupan lain di Polandia dan negara-negara Eropa Timur lainnya, tetapi juga Organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa Timur (Comecon). Polandia merupakan penyalur energi terbesar di lingkungan Comecon dan menjadi pasaran bersama negara-negara Eropa Timur. Dengan demikian stabilitas ekonomi blok ini terancam akibat krisis dalam negeri Polandia.

Masalah utama yang dihadapi Comecon adalah krisis energi yang timbul karena suplai batu bara Polandia berkurang.³ Secara demikian dapat

¹Lihat "Poland A Millstone of Debt Drags Warsaw Down," *Business Week*, 7 Desember 1981.

²*Ibid.*

³Lihat George Blazyca, *loc. cit.*, hal. 379.

dikatakan bahwa tanpa sumber energi batu bara Polandia, usaha-usaha partner dagangnya di Eropa Timur untuk meningkatkan produksi dan melaksanakan program-program industri nasionalnya terpukul. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara program pembangunan ekonomi negara Eropa Timur yang satu dan yang lain, karena program integrasi ekonomi Eropa Timur menjadi landasan utama kerja sama ekonomi antar negara di kawasan itu, seperti terungkap dalam Comecon sekarang ini. Krisis ekonomi Polandia selain mempengaruhi sistem suplai Comecon juga menyebabkan menurunnya volume kegiatan organisasi itu dan mempersulit usahanya untuk mempola program jangka panjangnya. Hal ini memaksa negara-negara anggota Comecon meninjau kembali dasar-dasar rencana lima tahun mereka dan mungkin juga garis-garis besar pengembangan dan perbaikan struktur perdagangan luar negeri mereka. Hal itu dimaksudkan agar rencana jangka panjang anggota-anggotanya tidak terganggu oleh produksi (industri dan pertanian) Polandia yang tidak menentu.

Selain itu, krisis ekonomi Polandia itu mempengaruhi perimbangan perdagangan antara anggota Comecon.¹ Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka besarlah kemungkinan bahwa hubungan dan kerja sama ekonomi blok Timur 3-4 tahun mendatang akan renggang. Untuk mencegah hal itu, dalam pertemuan Comecon di Bulgaria pertengahan tahun 1981 Jaruzelski mengusulkan suatu program "rent factory". Polandia memiliki sejumlah pabrik besar dan banyak tenaga manusia, tetapi sejak pergolakan buruh di Gdansk tahun 1980 pabrik-pabrik itu tidak bekerja penuh. Dengan program itu Polandia berharap dapat membujuk partner-partner dagangnya dalam Comecon untuk mengirim bahan-bahan mentah secara kredit. Kemudian Polandia akan mengolahnya menjadi barang-barang jadi dan menjualnya kembali kepada mereka. Hasil penjualan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk membayar bahan mentah tadi. Dengan demikian hubungan perdagangan antara anggota Comecon akan dapat dipertahankan dalam tingkat yang saling menguntungkan.

Dapat dikatakan bahwa krisis ekonomi Polandia sekarang ini merupakan akibat langsung dari pergolakan buruh tahun 1980 maupun tahun-tahun sebelumnya. Krisis ekonomi Polandia itu menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang selama ini dijalankan tidak mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul. Oleh sebab itu rakyat dan buruh Solidaritas menuntut perubahan-perubahan mendasar, biarpun usaha-usaha ke arah itu telah dilakukan sejak tahun 1971.² Selain itu, krisis ekonomi Polandia ini adalah

¹ Lihat "Comecon's Polish Crisis," *Newsweek*, 21 September 1981.

² Lihat Hans-Hermann Hohmann, *The East European Economic Reforms in the Seventies: Policy by Default*, Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Februari 1981, hal. 13.

akibat pelaksanaan sistem ekonomi komunis yang terlampau menitikberatkan pengeluaran militer dan industri berat. Sebagai akibatnya produksi barang konsumsi yang dibutuhkan rakyat berkurang dan harganya meningkat sehingga krisis itu menjadi semakin parah. Rencana-rencana ekonomi yang dirumuskan sering kali juga tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat umum. Sebagai akibatnya timbul salah urus dan ini bisa melumpuhkan kegiatan-kegiatan di sektor industri dan pertanian.

Krisis ekonomi Polandia kiranya sulit diatasi tanpa sumbangan pemikiran dan bantuan konkrit dari Barat maupun Timur khususnya Uni Soviet. Uni Soviet memang menganggap serius krisis itu, bukan saja karena ia bisa mengancam keutuhan sistem ekonomi komunis, tetapi juga semangat ideologi komunis dunia. Sehubungan dengan hal itu Uni Soviet mengambil langkah-langkah guna mempolakan program ekonomi Polandia agar ia mampu mencapai ekonomi swasembada (*economic self sufficiency*). Walaupun demikian, pelaksanaan dan keberhasilan program itu sepenuhnya bergantung pada usaha Polandia itu sendiri. Keberhasilan eksperimen Polandia ini juga bergantung pada perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi dan ini pada gilirannya memerlukan pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang mendasar. Tanpa transformasi sektor ekonomi serupa itu, tuntutan utama buruh kiranya sulit untuk dipenuhi dan akibatnya situasi bisa semakin buruk. Itulah dilema ekonomi dan lingkaran setan (*vicious circle*) yang dihadapi Polandia. Dalam keadaan itu pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang menjangkau diperlukan bukan saja untuk menciptakan ekonomi yang bisa hidup (*viable economy*) tetapi juga secara bertahap meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain itu, perubahan-perubahan dalam kebijakan industri di bidang pertanian diperlukan terutama dengan menekankan investasi di sektor agraria dan perluasan kredit petani secara besar-besaran. Tetapi yang lebih penting adalah pembaharuan-pembaharuan mendasar dalam sistem perencanaan, pengelolaan dan insentif di bidang industri seperti dipraktekkan di Hongaria.¹ Tanpa pembaharuan-pembaharuan serupa itu yang dipola untuk menekan secara drastis pemborosan ekonomi maupun meningkatkan produktivitas, maka harapan-harapan akan pemulihan jangka panjang akan sia-sia. Dengan demikian, untuk mengatasi lingkaran setan itu pemerintah Polandia kiranya perlu mengambil kebijakan baru yang memberi kesempatan kepada buruh untuk berperan lebih banyak dalam pengelolaan pabrik dan pertambangan maupun dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Persoalan yang timbul di sini ialah apakah negara-negara tetangga komunis Polandia, khususnya Uni Soviet, bisa menerima kebijakan serupa itu. Namun terlepas dari persoalan itu, harus diakui bahwa krisis

¹Mengenai pembaharuan ekonomi di Hongaria lihat lebih lanjut K.F. Cviic, "Hungary's Reforming Road," *The World Today*, vol. 37, no. 10, Oktober 1981. Lihat juga Seweryn Bialer, *op. cit.*, hal. 533.

ekonomi Polandia sekarang ini adalah suatu kenyataan dan bahwa paling tidak diperlukan 3-5 tahun untuk memulihkan keadaan ekonominya.

IV

Selain oleh keadaan ekonomi Polandia yang buruk keadaan Polandia sejak pergolakan buruh bulan Agustus tahun 1980 juga ditandai oleh pergantian pimpinan partai dan pemerintah. Tanggal 24 Agustus tahun 1980 Perdana Menteri Polandia Edward Babiuch mengundurkan diri sebagai jalan yang dianggap terbaik untuk menghentikan gelombang pemogokan buruh dan sebagai gantinya ditunjuk Pinkowski, akan tetapi usaha itu sia-sia. Keadaan ekonomi Polandia bahkan semakin parah dan sidang paripurna komite sentral partai komunis Polandia tanggal 3 Pebruari 1981 mengambil keputusan untuk menghentikan Pinkowski dan menunjuk Menteri Pertahanan Jaruzelski sebagai gantinya. Tampilnya Jaruzelski sebagai Perdana Menteri yang baru di satu pihak merupakan bagian dari usaha untuk mengatasi keadaan itu tetapi di lain pihak merupakan suatu pertarungan politik apakah situasi di Polandia dapat dikendalikan dalam batas-batas kemampuannya untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Duabelas hari kemudian ketua partai komunis Polandia Edward Gierek juga diberhentikan karena dianggap terlampau lunak terhadap buruh dan diganti oleh Stanislaw Kania, tetapi orang inipun diberhentikan pada tanggal 17 Oktober 1981 karena juga dianggap terlampau banyak memberikan konsesi kepada buruh dan oleh sebab itu gagal mengatasi krisis dalam negeri Polandia. Alasan lain pemecatan Kania adalah gaya kepemimpinannya yang tidak mencerminkan kemauan politik Kremlin. Secara demikian dapat dikatakan bahwa Moskow memainkan peranan dalam pergantian itu. Selain itu, Kania membocorkan masalah-masalah dalam negeri kepada pihak lain. Sebagai akibatnya, selama kepemimpinannya, peranan partai komunis Polandia menjadi kecil dan kurang berarti. Pada gilirannya ini menyebabkan partai komunis Polandia mengalami demoralisasi. Pergantian pemimpin-pemimpin partai yang memegang jabatan-jabatan tertinggi yang dimulai bulan Pebruari 1980 jelas mencerminkan ketidakstabilan yang mendalam dalam kepemimpinan komunis Polandia. Semuanya itu bukan saja akibat kepemimpinan Kania yang tidak mampu mempola kebijakan dalam negeri dan mengambil tindakan-tindakan tepat tetapi juga karena pribadi Kania sendiri tidak begitu dikenal di kalangan pimpinan partai, tetapi hanya dikenal di lingkungan aparat keamanan dalam negeri saja. Kepemimpinan Kania itu dan ketidakmampuannya untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai sebenarnya sudah terlihat menjelang berlangsungnya kongres partai komunis Polandia pada bulan Juli 1981 ketika ia dipanggil ke Moskow. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika ia diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua partai komunis Polandia.

Sebagai ganti Kania ditunjuk Jaruzelski yang telah menjabat Perdana Menteri Polandia dan Menteri Pertahanan. Dengan demikian kekuasaan terpusat pada satu orang. Pergantian ini bisa diartikan sebagai upaya untuk mencegah kemerosotan lebih jauh prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme di Polandia dan menunjukkan bahwa pimpinan partai akan mengambil sikap yang lebih tegas terhadap buruh. Jaruzelski adalah salah satu orang kuat di Polandia dan sangat populer di kalangan pemerintah karena sikapnya yang tegas dalam mengambil keputusan.¹ Tampilnya sebagai pemimpin tertinggi Polandia itu selain menggembirakan Moskow juga merupakan bagian dari usaha untuk mengatasi krisis itu dan sekaligus menghadapi ancaman terhadap tata sosial, politik dan ekonomi di negeri itu. Dengan diangkatnya Jaruzelski sebagai pemimpin tertinggi partai komunis Polandia, maka pimpinan tertinggi Polandia kini terletak di tangan seorang militer, suatu hal yang belum pernah terjadi sejak tahun 1930-an. Jaruzelski diharapkan bisa menyelamatkan Polandia dari kekacauan politik dan ekonomi lebih lanjut, khususnya karena jabatan-jabatan yang dipegangnya itu memungkinkannya untuk mengadakan perundingan-perundingan secara sekaligus dan mengatasi krisis itu secara cepat.

Dalam kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi Polandia dan sesuai dengan tekadnya untuk menyelesaikan krisis itu secara cepat, maka Jaruzelski pada tanggal 13 Desember 1981 mengeluarkan hukum darurat militer dengan pertimbangan bahwa kemerosotan moral dan kekacauan politik sudah mencapai tingkat yang membahayakan negara Polandia. Tanda-tanda akan diberlakukannya hukum darurat militer itu sudah terlihat ketika para Menteri Luar Negeri Pakta Warsawa mengadakan pertemuan di Moskow awal bulan Desember 1981. Pertemuan itu semula dimaksudkan untuk mengadakan penilaian mengenai situasi akhir di Polandia. Tetapi dengan semakin gawatnya situasi pemimpin-pemimpin Uni Soviet mendesak pemimpin Polandia untuk mengatasi krisis itu dengan kekuatan militer. Kehadiran panglima Pakta Warsawa dan pemimpin-pemimpin militer Uni Soviet di Warsawa tanggal 6 Desember 1981 merupakan petunjuk lain. Tetapi Uni Soviet menolak melibatkan diri dalam persiapan pelaksanaan hukum itu. Namun, keterlibatannya serupa itu sebenarnya sesuai dengan kedudukannya sebagai superpower yang memegang teguh prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme, dan sesuai dengan kebijakan globalnya ia tidak bisa mengambil sikap berdiam diri terhadap kejadian-kejadian yang menyentuh kepentingan dan keamanan serta ideologi komunis Uni Soviet, biarpun berlangsung di Eropa Timur.

Sejalan dengan dikeluarkannya hukum itu dan sesuai dengan konstitusi Polandia Jaruzelski membentuk Dewan Militer yang dimaksudkan untuk mengawasi langsung pelaksanaan hukum itu. Dalam rangka itu ia melakukan

¹ Lihat Hella Pick, "The Reckoning," *The Guardian Weekly*, 20 Desember 1981.

pembersihan dengan menangkap sejumlah pemimpin Solidaritas dan bekas pemimpin Polandia, antara lain Edward Gierek dan Jaroszwics, masing-masing bekas ketua partai dan bekas Wakil Perdana Menteri. Penangkapan bekas pemimpin-pemimpin Polandia itu menunjukkan bahwa sasaran pelaksanaan hukum darurat militer itu bukan saja menekan buruh tetapi juga menyingkirkan pejabat-pejabat tinggi Polandia yang dianggap bertanggung jawab atas krisis Polandia sekarang ini. Ini berarti bahwa Jaruzelski berusaha menyelesaikan krisis Polandia itu secara menyeluruh dan adil (evenhanded). Sementara pengamat berpendapat bahwa tindakan Jaruzelski itu selain dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mempertahankan sistem sosial di Polandia juga diarahkan untuk menciptakan konsensus nasional. Tapi konsensus ini kiranya hanya dapat dicapai kalau kelompok-kelompok independen di Polandia juga diikutsertakan dalam menyelesaikan krisis itu.

Jaruzelski memang tidak mempunyai pilihan selain memberlakukan hukum darurat militer itu, karena selama itu tidak berhasil mengurangi ketegangan di Polandia, biarpun telah berusaha membujuk buruh agar memperlunak tuntutan mereka dan memperingatkan bahaya campur tangan Uni Soviet. Walaupun demikian, dalam pidatonya tanggal 13 Desember 1981 Jaruzelski menyatakan tetap membuka kesempatan untuk suatu penyelesaian politis. Jika penyelesaian itu berupa kompromi, maka suatu hal yang dianggap pokok di sini adalah bahwa inti perjanjian Gdansk tahun 1980 harus dihormati. Selain itu, jika buruh Solidaritas bersedia kembali bekerja untuk ikut memperbaiki keadaan ekonomi Polandia, maka ia harus diberi kesempatan untuk mempertahankan hak-hak lahirnya sebagai persatuan independen, lepas dari pengawasan pemerintah, termasuk hak mogok guna mempertahankan kepentingan-kepentingannya yang sah, biarpun dengan pembatasan-pembatasan. Tetapi pembatasan-pembatasan inipun harus dirumuskan secara jelas sehingga menjamin hak-hak dasarnya.

Pelaksanaan hukum darurat militer itu memancing reaksi keras dari gereja Katolik di Polandia dan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menganggap represi militer di Polandia sebagai campur tangan langsung Uni Soviet dan oleh sebab itu menjatuhkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Uni Soviet. Tetapi sekutu-sekutu Amerika Serikat, terutama Jerman Barat, menentang sikap Amerika Serikat itu. Sebaliknya mereka menganggap tindakan Amerika Serikat itu sebagai *fait accompli*.¹ Walaupun demikian, Amerika Serikat tetap pada keputusannya dan bahkan mengancam untuk menjatuhkan sanksi-sanksi lebih banyak lagi atas Uni Soviet, tetapi keputusan

¹Mengenai perbedaan pendapat antara Amerika Serikat dan sekutunya NATO, khususnya Jerman Barat, mengenai krisis Polandia lihat lebih lanjut Hella Pick, "West Split over Poland," *The Guardian Weekly*, 3 Januari 1982. Lihat juga Bantarto Bandoro, "Perbedaan Persepsi Amerika Serikat — Jerman Barat Mengenai Krisis Polandia," *Suara Karya*, 2 Maret 1982.

dan ancaman itupun tidak mampu mendesak Jaruzelski mencabut hukum darurat militer itu.

Diakui bahwa sejak pergantian pimpinan partai komunis Polandia tanggal 17 Oktober 1981 peranan partai komunis ini menurun dan kurang berarti. Oleh sebab itu diberlakukannya hukum darurat militer itu bisa diartikan sebagai usaha Jaruzelski untuk melakukan konsolidasi interen, dalam arti memulihkan peranan dan kekuatan serta kepercayaan partai. Selain itu, tindakan Jaruzelski diartikan sebagai usaha untuk mencegah intervensi militer Uni Soviet maupun buyarnya kerja sama internasional Polandia, khususnya dengan negara-negara Eropa Timur. Hal itu bukan saja menunjukkan bahwa Polandia berusaha menyelamatkan posisi internasionalnya tetapi juga bahwa krisis Polandia sekarang ini bersifat nasional. Tapi harus diakui bahwa krisis Polandia ini mengungkapkan bahwa sistem komunis bukan saja tidak dapat diterima tetapi juga tidak mampu beroperasi secara memadai dan oleh sebab itu dianggap gagal mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul. Walaupun demikian, juga diakui bahwa bagi Uni Soviet perkembangan di Polandia sekarang ini merupakan suatu krisis atau ancaman terhadap sistem komunisme. Uni Soviet menganggapnya serius, bukan saja karena perkembangan itu bisa menjadi sumber ketegangan di Eropa Timur, tetapi juga karena ia khawatir bahwa pemimpin komunis Polandia tidak mampu mengatasinya. Uni Soviet kemungkinan akan mengambil tindakan jika ketegangan itu mencapai tingkat yang membahayakan sistem keamanan Pakta Warsawa dan imperium Uni Soviet itu sendiri. Kemungkinan ini terutama didasarkan pada komitmen militer Uni Soviet untuk mempertahankan kedudukan Eropa Timur sebagai pangkalan militer (military staging) dan zone penyanggah yang bisa digunakan untuk tujuan defensif maupun ofensif.¹

Jika dikaji lebih dalam lagi, maka jelaslah bahwa persoalan fundamental yang dihadapi Uni Soviet adalah sejauh mana kepemimpinan komunis Polandia mampu mengendalikan perkembangan itu. Oleh sebab itu yang dikhawatirkan Uni Soviet bukan semata-mata implikasi-implikasinya bagi Eropa Timur dan sistem pertahanannya tetapi juga loyalitas pimpinan partai terhadap Uni Soviet dan kemampuannya untuk mengendalikan krisis itu secara cepat sesuai dengan prinsip-prinsip ideologi komunis. Jika sampai pada kesimpulan bahwa terjadi erosi loyalitas pimpinan komunis Polandia terhadapnya, maka Uni Soviet kemungkinan besar akan turun tangan secara langsung seperti dilakukannya di Hongaria tahun 1956 dan di Cekoslovakia tahun 1968 karena muncul dimensi anti Uni Soviet dalam kepemimpinan partai.²

¹ Lihat A. Ross Johnson, *The Warsaw Pact: Soviet Military Policy in Eastern Europe*, Rand/P-6583, Juli 1981, hal. 3.

² Mengenai perbedaan antara kejadian di Polandia dan di Cekoslovakia lihat lebih lanjut David W. Paul dan Maurice D. Simon, "Poland Today and Czechoslovakia 1968," *Problems of Communism*, September — Oktober 1981.

Uni Soviet tidak bisa membiarkan krisis Polandia itu berlangsung terus, tetapi berpendapat bahwa krisis yang gawat itu hanya dapat dikendalikan dan diselesaikan dengan kekuatan militer Polandia, biarpun di bawah pengawasan Uni Soviet. Secara demikian dapat dikatakan bahwa penunjukan seorang militer sebagai pimpinan tertinggi Polandia selain menunjukkan prioritas Moskow untuk memulihkan dan memperkuat kembali kepemimpinan komunis Polandia juga merupakan bagian dari strategi Uni Soviet untuk menekan buruh dan sekaligus mengatasi krisis itu, biarpun secara tidak langsung. Dengan demikian, dua hal pokok yang tidak dapat dibiarkan oleh Uni Soviet karena sistem komunismenya adalah lahirnya nasionalisme rakyat dan loyalitas pimpinan partai yang diragukan. Oleh sebab itu dapat dimengerti kalau Uni Soviet terus memonitor perkembangan di Polandia itu sebagai suatu hal yang sangat serius dan mempertimbangkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer secara langsung di negara itu. Tetapi penggunaan kekuatan militer (intervensi militer) itu akan mendapat perlawanan keras dari rakyat dan angkatan bersenjata Polandia dan ini bisa menimbulkan konsekuensi-konsekuensi lain yang lebih serius dari pada ketika ia menyerbu Hongaria tahun 1956, Cekoslovakia tahun 1968 dan Afghanistan tahun 1979.

Perkiraan di atas terutama didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, campur tangan langsung Uni Soviet di Polandia akan menimbulkan suatu perang total antara kedua negara dan operasi militer di jantung Eropa itu akan menimbulkan konsekuensi militer Eropa Timur yang sulit diramalkan. Demikianpun tingkah laku negara dan tentara Pakta Warsawa akibat pengalaman yang ada pada tahun 1968.¹ Kedua, Uni Soviet harus menanggung beban yang cukup berat karena selain harus mempertahankan pasukannya di Polandia juga harus membantu perekonomian Polandia termasuk penyelesaian hutang luar negeri Polandia. Ketiga, campur tangan itu bisa merusak (*shatter*) hubungan partai komunis Uni Soviet dengan partai-partai komunis utama Eropa Barat, misalnya partai komunis Italia dan Spanyol, dan intensitas konflik mereka dengan Moskow bisa menarik persaingan Uni Soviet — Cina. Keempat, intervensi Uni Soviet di Polandia bisa merapuhkan salah satu dasar dan mungkin penopang kebijakan luar negeri Uni Soviet, dan membangkitkan rasa persatuan sayap kiri dan kanan di Eropa untuk mengutuk Uni Soviet. Kelima, intervensi Uni Soviet di Polandia akan menimbulkan persoalan mengenai kekuatan nuklir mandala (TNF) di Eropa. Diakui bahwa terdapat perbedaan pandangan antara negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mengenai masalah itu. Amerika Serikat di bawah Reagan menganggap pengembangan kekuatan nuklir mandala di Eropa sebagai prioritas utama dan faktor yang memperkuat posisi tawar menawar

¹ Lihat Seweryn Bialer, *op. cit.*, hal 534. Lihat juga Alex Alexview, A. Ross Johnson dan S. Enders, *If the Soviet Invade Poland*, Rand/P-6569, Desember 1980, hal. 4-6 dan A. Ross Johnson, *op. cit.*, hal. 22-27.

Barat dengan Uni Soviet. Sebaliknya negara-negara Eropa Barat berpendapat bahwa kekuatan nuklir mandala itu hanya akan dikembangkan kalau Amerika Serikat melakukan perundingan perlucutan senjata dengan Uni Soviet. Sikap Eropa Barat ini menguntungkan Uni Soviet karena kemungkinan ancaman pengembangan kekuatan nuklir mandala terhadapnya menjadi berkurang. Tetapi intervensi Uni Soviet di Polandia kemungkinan besar akan membuat Eropa Barat lebih menghendaki pengembangan kekuatan nuklir mandala itu. Keenam, intervensi Uni Soviet di Polandia akan mendorong pemerintah Reagan untuk mempolakan suatu kebijakan global untuk mendesak kepentingan-kepentingan Uni Soviet maupun untuk meningkatkan pembangunan militernya, memperluas kemampuan pasukan gerak cepatnya dan mempercepat usaha-usaha pencarian pangkalan-pangkalan baru di Teluk Parsi. Lagi pula intervensi itu akan memberikan suatu momentum kepada peningkatan hubungan Amerika Serikat — Cina. Ketujuh, intervensi Uni Soviet di Polandia akan mempengaruhi skala dan sifat ancaman militer Uni Soviet terhadap NATO. Misalnya, kalau Uni Soviet harus menggunakan sekitar satu juta pasukan untuk menyerbu Polandia, maka ia harus mempertahankan sekitar 300.000 pasukannya di Polandia sebagai pasukan pendudukan. Hal ini berarti bahwa ia akan terpaksa mengurangi 22 divisi yang digelar di Jerman Timur dan ini pada gilirannya mengurangi arti penggelaran itu sebagai ujung tombak postur militer Uni Soviet menghadapi NATO.

Dengan demikian jelas bahwa perkiraan-perkiraan mengenai konsekuensi langsung dan tidak langsung serta jangka pendek maupun jangka panjang intervensi Uni Soviet itu menyulitkan pemimpin-pemimpin Uni Soviet untuk merumuskan kebijakan luar negerinya. Walaupun demikian, intervensi itu bisa terjadi dalam keadaan "luar biasa" dan jika pemimpin Uni Soviet berkesimpulan bahwa situasi di Polandia tidak bisa diatasi dengan cara-cara lain. Keadaan "luar biasa" itu kiranya bisa diartikan sebagai berikut. Pertama, tuntutan-tuntutan buruh dan pemogokan umum terus meningkat sehingga Pemerintah Polandia tidak mampu mengatasinya. Kedua, perlawanan Pemerintah Polandia berkurang akibat tekanan tuntutan-tuntutan buruh dan buruh itu sendiri secara berangsur menguasai pabrik-pabrik dan mendapatkan kekuatan veto atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketiga, eselon-eselon atas partai komunis Polandia mengalami transformasi seperti terjadi di Cekoslovakia tahun 1968.

Jika Uni Soviet mengambil keputusan untuk menyerbu Polandia, maka persoalan yang timbul di sini adalah persekutuan yang bagaimana akan dibentuk dan sejauh mana tentara-tentara Eropa Timur bisa dipercaya untuk menyerang sesama bangsa Eropa (Timur). Persoalan ini dapat dikaji dari sudut kepentingan dan pengalaman partisipasi masing-masing negara dalam operasi militer Pakta Warsawa.

Sementara analis militer berpendapat bahwa tentara Jerman Timur sebagai salah satu anggota pasukan Pakta Warsawa bisa dipercaya. Tetapi loyalitas perwira-perwiranya dalam operasi itu diragukan. Dalam operasi militer di Cekoslovakia tahun 1968 perwira-perwira Jerman Timur memang menunjukkan kepercayaan yang tinggi. Tapi timbulnya kerusuhan-kerusuhan di kalangan pemuda Jerman Timur sekarang ini dan tanggapan mass medianya terhadap sikap pasifisme menunjukkan adanya kemerosotan moral di kalangan tentara Jerman Timur. Selain itu, Uni Soviet tidak dapat mengabaikan pengaruh psikologis penggelaran tentara Jerman Timur di Polandia, dalam arti bahwa seragam abu-abu bisa mengingatkan bangsa Polandia akan penyerbuan Nazi dalam Perang Dunia II. Dengan demikian Uni Soviet harus mengatasi masalah itu sebelum mengambil keputusan untuk menyerbu Polandia. Demikianpun kepercayaan tentara Cekoslovakia sebagai salah satu unsur kekuatan militer Pakta Warsawa sulit dipertahankan karena pernah mengalami disintegrasi akibat pengunduran diri perwira-perwira menengah dari kepemimpinan Pakta Warsawa secara massal.¹ Sementara itu tentara Hongaria sekarang ini tampaknya tidak bersemangat untuk ikut serta dalam operasi militer semacam itu akibat hubungan tradisionalnya dengan Polandia dan trauma Hongaria sendiri dalam peristiwa tahun 1956. Bulgaria mungkin juga tidak akan melibatkan pasukannya secara masif karena pertimbangan geografis. Sebaliknya Rumania sudah lebih dahulu memperingatkan bahaya intervensi Uni Soviet. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan khusus negara-negara sekutu Uni Soviet itu akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi Uni Soviet dan ini bisa dianggap sebagai salah satu faktor yang memperkecil kemungkinan intervensinya di Polandia.

Bahwa Uni Soviet tidak melakukan intervensi di Polandia tahun 1956 dan 1970 merupakan suatu petunjuk bahwa ia lebih senang dengan suatu penyelesaian politik. Uni Soviet kemungkinan akan mengambil sikap serupa itu tahun ini. Usaha-usahanya untuk memulihkan keadaan ekonomi Polandia sejak persetujuan Gdanks tahun 1980² memperkuat petunjuk itu. Tetapi juga harus diakui bahwa perkembangan di Polandia sekarang ini merupakan batu ujian bagi pemimpin-pemimpin Kremlin apakah Uni Soviet tidak akan mencabut komitmennya untuk menghormati kedaulatan suatu negara Eropa Timur dan tidak turut campur dalam masalah dalam negerinya.

Perkembangan di Polandia sekarang ini bukan saja menjadi pusat perhatian Kremlin tetapi juga Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya,

¹Lihat Alex Alexview, A. Ross Johnson, S. Enders Wimbush, *op. cit.*, hal. 4-6. Lihat juga A. Ross Johnson, *op. cit.*, hal. 22 dan 24.

² Lihat Adam Broke. "Poland: The Cliff's Edge," *Foreign Policy*, no. 41, Winter 1980/1981, hal. 159-160.

khususnya karena invasi Uni Soviet ke Polandia akan merusak detente Timur — Barat. Oleh sebab itu Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menghendaki agar krisis Polandia diselesaikan secara damai. Selain itu, negara-negara Barat sendiri menyadari bahwa krisis Polandia itu adalah masalah dalam negeri negara itu, dan sesuai dengan perjanjian Helsinki mereka perlu mendesak Uni Soviet agar mengambil sikap serupa. Negara-negara Barat perlu mengungkapkan masalah Polandia ini dalam konteks detente dan hubungan Timur — Barat yang lebih luas. Usaha ini bukan dimaksudkan untuk menarik Polandia dari Pakta Warsawa tetapi sebagai usaha untuk membantu terbentuknya perjanjian-perjanjian kerja sama internasional baru. Dalam hubungan ini aliansi Polandia — Uni Soviet kiranya dapat dijadikan jembatan yang bermanfaat antara dua bagian Eropa itu untuk mencapai suatu kerja sama konkrit yang saling menguntungkan.¹ Tetapi kerja sama ini tidak ada artinya jika krisis ekonomi dan ketegangan di Polandia tidak diatasi secara cepat. Oleh sebab itu bantuan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara Barat diperlukan. Kebijakan Amerika Serikat mengenai krisis ekonomi Polandia ini seyogyanya dilaksanakan melalui suatu "konsorsium" yang dibentuk bersama negara-negara Eropa Barat, terutama Jerman Barat. Konsorsium ini kemudian bisa mengambil kebijakan untuk memberikan kredit jangka panjang dan bantuan-bantuan lainnya kepada Polandia, sambil menekankan bahwa kredit dan bantuan ini hanya diberikan jika Pemerintah Polandia sendiri mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyusun kembali kebijakan dan sistem ekonominya. Dengan demikian, usaha Barat dalam memulihkan ekonomi Polandia diharapkan bisa mengubah situasi konfrontasi di negara itu menjadi suatu kerja sama Timur-Barat.

V

Sehubungan dengan perkembangan Polandia sejak bulan Agustus tahun 1980, dapat dikatakan bahwa krisis Polandia sekarang ini mencerminkan suatu benturan antara arus ideologi dan kemasyarakatan. Aksi buruh itu bukan lagi semata-mata ungkapan aspirasi akan perbaikan ekonomi dan taraf hidup rakyat, tetapi telah menjadi sarana untuk merombak struktur ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Aksi pemogokan itu telah menjadi alat demokratis rakyat Polandia untuk mendesak pemerintah agar melakukan perubahan-perubahan yang mendasar. Beberapa perubahan dilakukan dan sebagian tuntutan buruh dipenuhi oleh pemerintah. Tetapi ini belum memuaskan dan menunjukkan bahwa pemerintah sendiri tidak mampu melakukan perubahan-perubahan lebih lanjut yang berarti, baik bagi rakyat

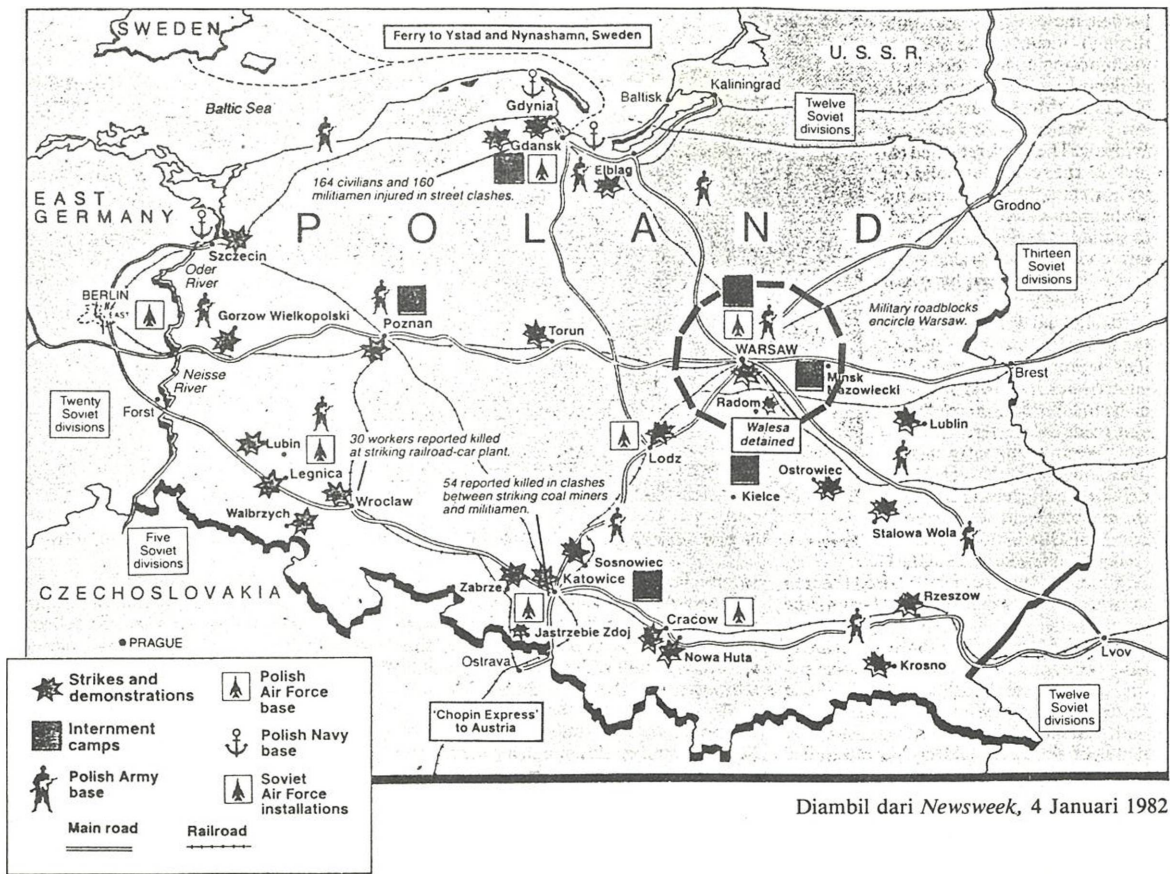
¹*Ibid.*, hal. 160-161.

Polandia maupun masa depan Polandia itu sendiri. Sebagai akibat ketidakmampuan ini wibawa partai komunis Polandia menurun. Di pihak lain Uni Soviet tidak bisa membiarkan krisis Polandia itu berlangsung terus, tetapi berpendapat bahwa krisis itu hanya dapat dikendalikan dengan kekuatan militer Polandia. Secara demikian dapat dikatakan bahwa penunjukan seorang militer Jenderal Jaruzelski sebagai pimpinan tertinggi Polandia menunjukkan prioritas Moskow untuk memulihkan wibawa dan memperkuat kembali kepemimpinan komunis Polandia.

Langkah utama Jaruzelski untuk mengatasi krisis itu adalah memperlakukan hukum darurat militer. Pelaksanaan hukum itu mengungkapkan tekad Polandia untuk tidak meninggalkan Pakta Warsawa maupun sistem komunis. Dengan demikian, pelaksanaan hukum darurat itu berarti bahwa kartu nasional Polandia dimainkan untuk keuntungan dan kepentingan Uni Soviet. Tetapi sejauh mana hukum itu berhasil mengatasi krisis masih harus kita lihat. Namun, jika berhasil hal itu berarti bahwa Jaruzelski bukan saja telah menciptakan suatu preseden bagi pemerintah negara-negara Eropa Timur lainnya untuk menggunakan kekuatan militer jika menghadapi krisis serupa tetapi juga membuktikan bahwa partai komunis dan ideologi Marxis mampu bertahan.

Belum ada tanda-tanda bahwa krisis Polandia itu akan segera berakhir. Oleh sebab itu penyelesaian krisis itu secara damai kiranya sulit dicapai dalam waktu dekat. Bangsa Polandia, termasuk buruh, intelektual dan anggota partai menyadari perlunya perubahan-perubahan radikal untuk menyelamatkan negara itu dari krisis ekonomi dan kebangkrutan politik, tetapi di lain pihak juga disadari bahwa pelaksanaan perubahan-perubahan itu sulit mengingat kekuatan veto militer Uni Soviet. Dengan demikian, kesenjangan antara keharusan dan kemungkinan itu merupakan suatu kenyataan yang muncul dari situasi Polandia. Itulah dilema yang dihadapi Polandia sekarang ini.

Uni Soviet rupanya belum memutuskan untuk melakukan intervensi di Polandia. Tetapi kemungkinan itu tetap ada selama krisis Polandia itu berlangsung terus. Dalam hal ini terdapat beberapa opsi terbuka bagi Uni Soviet untuk melakukan manuver-manuver militer yang suatu saat bisa diubah menjadi suatu invasi besar-besaran (full scale invasion). Opsi pertama adalah menggelar pasukan Uni Soviet secara besar-besaran di sepanjang perbatasan Polandia sebagai alat untuk mengintimidasi buruh dan sekaligus memperkuat tulang punggung pimpinan komunis Polandia. Opsi kedua mencakup eskalasi tekanan-tekanan dengan melakukan manuver-manuver militer di daratan Polandia. Opsi ini sekaligus mendesak pimpinan Polandia untuk meningkatkan intimidasi mereka terhadap gerakan-gerakan buruh. Opsi ketiga dan yang paling menguntungkan Uni Soviet tetapi efektivitasnya



Diambil dari Newsweek, 4 Januari 1982

diragukan adalah memonitor perbatasan Polandia dan membiarkan tentara Polandia mengatasi sendiri situasi itu. Tiga opsi ini bisa berubah menjadi suatu invasi besar-besaran jika perkembangan politik di Polandia melampaui batas-batas yang bisa diterima oleh sistem komunis. Invasi itu akan menunjukkan bahwa pemimpin Uni Soviet tidak bisa menerima gangguan serius di lambung Baratnya dan menganggap Solidaritas, biarpun terbatas kekuasaannya, tidak sesuai dengan konsep yang dianut negara-negara komunis. Invasi itu juga akan menunjukkan perasaan cemas Uni Soviet mengenai kemungkinan munculnya gerakan-gerakan kelas pekerja yang pada gilirannya bisa mempengaruhi stabilitas imperiumnya di Eropa Timur. Tetapi invasi semacam itu bukan saja akan memancing reaksi keras dari negara-negara Barat, tetapi juga akan mendapat perlawanan keras dari rakyat dan angkatan bersenjata Polandia, yang oleh sementara analis militer dianggap terkuat di Eropa Timur dan terorganisasi secara baik. Sebagai bagian integral dari Pakta Warsawa, maka tentara Polandia sudah pasti mengenal betul pola operasi pasukan-pasukan Uni Soviet, termasuk kebiasaannya menggilir pasukannya di sepanjang perbatasan negara-negara anggota Pakta Warsawa. Dengan demikian, untuk menundukkan Polandia Uni Soviet harus menyusun kembali strateginya dan menggunakan kekuatan yang lebih besar dari pada ketika menyerbu Cekoslovakia. Sebaliknya Uni Soviet tidak bisa membiarkan benih-benih pergolakan di Polandia mempengaruhi seluruh sistem komunisme di Eropa Timur. Itulah dilema yang dihadapi Uni Soviet dan sekaligus merupakan pertarungan besar Uni Soviet pada awal dasawarsa 1980-an.

LAMPIRAN

21 TUNTUTAN BURUH YANG DIAJUKAN DALAM PERUNDINGAN DI GDANKS BULAN AGUSTUS TAHUN 1980¹

1. Pembentukan serikat buruh bebas Solidaritas sesuai dengan Undang-Undang Trade Union tahun 1949.
2. Hak untuk mogok.
3. Dalam waktu tiga bulan pemerintah harus mengajukan kepada Parlemen Undang-Undang Pengawasan Pers.
4. Mendesak diadakannya pengawasan terhadap keabsahan pemecatan setelah pemogokan tahun 1970 dan 1976.
5. Mengumumkan pembentukan serikat buruh bebas dan tuntutananya dalam mass media nasional.
6. Mempercepat pembaharuan ekonomi.
7. Pembayaran selama pemogokan sebesar 40% dari gaji.
8. Peningkatan gaji secara berangsur untuk semua kelompok pekerja, terutama yang menerima gaji terendah.
9. Mengurangi kenaikan harga bahan pangan dengan cara meningkatkan pengawasan sektor-sektor swasta dan menghapuskan kenaikan harga secara gelap.
10. Meningkatkan suplai daging.
11. Meningkatkan produksi pertanian dan membatasi ekspor daging.
12. Pemilihan kader-kader utama harus didasarkan pada kualifikasi dan kemampuan mereka dan ini berlaku bagi anggota partai dan non partai.
13. Mengubah program suplai daging dengan mempertimbangkan kemungkinan penggunaan sistem kupon.
14. Mengurangi batas usia pensiun.
15. Meningkatkan penghasilan usia terendah dan pensiunan yang tidak mampu sesuai dengan kemampuan ekonomi negara.
16. Meningkatkan pelayanan kesehatan, suplai obat-obatan dan gaji petugas lembaga kesehatan serta mengubah sistem penggajian perawat dan menyiapkan program pemerintah guna meningkatkan kesehatan warga negara.
17. Memperbanyak sekolah taman kanak-kanak.
18. Mendesak diadakannya penilaian mengenai kemampuan ekonomi nasional.
19. Mendesak agar merumuskan program peningkatan sistem perumahan guna mengurangi jangka waktu untuk mendapatkan rumah.
20. Meningkatkan biaya-biaya perjalanan bisnis.
21. Mengurangi jumlah hari kerja menjadi lima hari dalam satu minggu.

¹ Lihat "Documentation. Crisis in Poland," *Survival*, September — Oktober 1981, hal. 229-231.